



## PERTANYAAN & MASUKAN

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI



RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI BERSAMA DIREKTUR UTAMA

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

SENIN, 17 JANUARI 2022

Disampaikan oleh : Renny Astuti, S.H., S.PN

No Anggota : A - 71

-----

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Salam Indonesia Raya...!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Jajarannya.**

Izinkan kami menyampaikan ringkasan tanggapan dan pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

1. Peningkatan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat pada Desember 2021 yang mencapai 131,46 tentu sangat menggembirakan karena mayoritas Perkebunan Rakyat adalah Petani Kelapa Sawit, Peningkatan Kesejahteraan ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
2. Melimpahnya bahan baku minyak goreng di Indonesia tidak bisa membendung lonjakan harga minyak goreng didalam negeri karena produsen minyak goreng domestik belum sepenuhnya terintegrasi dengan produsen CPO selain itu Produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai

harga pasar internasional Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga CPO internasional maka harga CPO di dalam negeri juga turut naik

Pada kesempatan ini kami minta

- Ada integrasi antara seluruh produsen minyak goreng dan produsen CPO.
  - Produsen minyak goreng dalam negeri tidak membeli dengan harga Internasional.
  - Pemerintah mengkaji mekanisme DMO (*domestic market obligation*) kelapa sawit untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri
3. Penyediaan Dana BPDPKS sebesar 3,6 T untuk menutup selisih antara harga pasar dengan HET minyak goreng kemasan sederhana harus tepat sasaran jangan sampai pelaku usaha makanan skala besar dan masyarakat menengah keatas ikut mendapatkan selain itu kami juga menilai harga minyak goreng sebesar Rp14.000/liter masih lebih tinggi dari acuan HET minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 sebesar Rp11.000/ Liter oleh sebab itu kami minta untuk mengkaji kembali harga Rp14.000/liter tersebut.
  4. Dari data yang dipaparkan terkait kinerja program peremajaan sawit rakyat dijelaskan bahwa jumlah pekebun sebanyak 105.684 dengan luas lahan sebesar 242.537 Ha dan dana tersalur sebesar Rp. 6,59 triliun sejak tahun 2016 sampai 2021. Dari data tersebut juga pada tahun 2021 terjadi penurunan luas lahan yang mendapatkan program tersebut. Pertanyaannya mengapa luas lahan dan jumlah pekebun yang mendapat PSR ini terjadi penurunan yang sangat drastis dari tahun 2020 ke tahun 2021?.
  5. Penyaluran dana BPDPKS digunakan untuk program peningkatan SDM petani kelapa sawit melalui pelatihan, edukasi, konseling, pendampingan dan fasilitasi. Dimanakah kegiatan ini dilaksanakan dan berapa kali dalam setahun ? Adakah data valid yang bisa kami dapatkan terkait alokasi kegiatan tersebut dan berapa prosentase anggaran untuk kegiatan tersebut dari total anggaran dari BPDPKS ?
  6. Berdasarkan evaluasi kinerja dari program PSR, permasalahan utama yang terus dialami adalah lahan perkebunan kelapa sawit yang ilegal. Bagaimana

bentuk upaya dan langkah-langkah ril BPDPKS untuk menekan meluasnya lahan kelapa sawit ilegal ?

7. Dana anggaran yang disalurkan untuk program PSR tahun 2021 sebesar 1,26 Triliun yang dibagikan kepada beberapa provinsi yang sudah dilampirkan pada bahan BPDPKS. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana tindakan efektif yang dilakukan oleh BPDPKS untuk menjaga agar anggaran yang diberikan kepada setiap provinsi dapat berjalan beriringan dengan tujuan program PSR? Mohon adanya penjabaran anggaran secara spesifik dan penjelasan dari BPDPKS untuk memastikan bahwa anggaran yang diberikan pada setiap provinsi dapat dilakukan sesuai tujuan dari program dengan menampilkan data dari tahun 2020-2021 agar kami lihat perbandingannya.
8. Dalam bahan BPDPKS terdapat tabel yang menunjukkan spesifikasi dari progres BPDPKS tahun 2021. Tabel tersebut terdiri tahapan yang diproses oleh BPSPKS seperti proses penerbitan SK Dirut, dibatalkan, dan yang telah disalurkan. Dimana masing-masing tahapan memiliki jumlah proposal, pekebun, dan luas lahan yang berbeda. Pada proses penerbitan SK Dirut sebanyak 40 proposal belum diproses karena Rekomendasi Teknis (Rekomtek) masuk pada bulan desember 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana keberlanjutan yang telah mencapai proses penerbitan SK Dirut? Apakah akan dilanjutkan kembali di tahun 2022? Selain itu, bagaimana tindakan dari BPDPKS bagi proposal yang dibatalkan karena permasalahan kawasan hutan yang tidak memadai? Apakah akan ada penyediaan lahan bagi mereka yang dibatalkan? Mohon penjelasannya.
9. BPDPKS bersama dengan Dinas Perkebunan berupaya untuk mendorong pembentukan kelompok tani atau gapoktan di dalam upaya usaha perkebunan sawit rakyat secara berkelompok. Apa saja masalah dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan proses kelompok tani menjalani program PSR serta bagaimana upaya penyelesaiannya? Apakah pembentukan kelompok tani akan menjadi solusi ditengah keengganan para petani mengikuti program PSR? Dengan alasan kehilangan penghasilan selama masa tanam replanting yang cukup panjang.

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Jajarannya.**

Demikian masukan dan pertanyaan ini kami sampaikan, besar harapan agar kebijakan pengembangan sawit rakyat ini dapat dijalankan dengan optimal dan berpihak kepada kesejahteraan petani sawit rakyat serta merangkul seluruh stakeholder terkait untuk terlibat aktif.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Petani Makmur, Indonesia Sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| G. Budisatrio Djiwandono                | - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI |
| Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU  | - Kapoksi                      |
| Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.            | - Anggota                      |
| Dr. Ir. Hj. Endang S Thohari DESS.,M.Sc | - Anggota                      |
| Ir. H. TA Khalid, M.M.                  | - Anggota                      |
| Renny Astuti, S.H., S.PN.               | - Anggota                      |
| Ir. Dwita Ria Gunadi                    | - Anggota                      |